



UMKM SEBAGAI PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN SUMBAWA

Oleh**Marisa Sutanty¹⁾, Asmini²⁾, Elly Karmeli³⁾, Suprianto⁴⁾, Roos Nana Sucihati⁵⁾****^{1,2,3,4,5}Universitas Samawa Sumbawa Besar****Email: ¹Marisha@gmail.com, ²asminifem@gmail.com, ³ellykarmeli@gmail.com,
⁴antobalong83@gmail.com, ⁵nana.maula@gmail.com****Abstrak**

Pembangunan sektor ekonomi suatu daerah merupakan suatu hal yang sangat urgen untuk di perjuangkan, mengingat pembangunan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur pembangunan nasional adalah pertumbuhan ekonomi, Salah satu sector yang diharapkan mampu memegang peranan strategis dalam pembangunan ekonomi suatu daerah dan khususnya Kabupaten Sumbawa, adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan hasil kajian dalam jurnal dengan judul Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sumbawa, dapat ditunjukkan sebagai berikut: 1. Potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sumbawa. Cukup Banyak. Dengan Produk yang potensial. Sebut saja kopi, madu, permen susu, manjareal, masin, kerupuk atom dan lainnya terus dibina agar semakin berkembang. Baik dari aspek produksi maupun pemasarannya, 2. Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Cukup Besar. Jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Sumbawa sampai dengan tahun 2019 ini seluruhnya mencapai 12.648 unit usaha. Dari jumlah tersebut, terdapat 1.050 unit usaha yang baru terbentuk pada periode Januari hingga Agustus tahun 2019. Pada tahun ini, pemerintah daerah menargetkan sebanyak 500 UMK akan diterbitkan IUMK-nya, namun yang sudah terealisasi atau sudah diterbitkan iumk-nya sebanyak 310 UMK, Berdasarkan Jenis Usaha Jumlah yaitu: 1. Usaha Mikro 410, 2. Usaha Kecil 411, 3. Usaha Menengah 32, 4. Penyerapan Tenaga Kerja melalui UMKM meningkat setiap Tahun. Rata-rata dari 3 Tahun jumlah UMKM = 11.569. Dan Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja 46.677. 5. Pemerintah dan Perbankan sangat mendukung Pengembangan (UMKM), Dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) per 31 Juli 2022, dimana Kabupaten Sumbawa tertinggi mengakses KUR sebanyak Rp 596,27 miliar dengan jumlah 15.617 debitur. 6. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Memegang Peran Strategis, Hal ini atas menggambarkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan hal yang sangat Urgen untuk membangun ekonomi suatu daerah dengan perannya yang sangat nyata dalam perekonomian, mulai dari sumbangannya terhadap PDRB, kemampuannya menyerap tenaga kerja, maupun besarnya jumlah unit usaha yang terlibat. dikatakan UMKM juga telah terbukti memiliki daya tahan yang cukup kuat menghadapi krisis ekonomi. (PSG) baru bagi PAD di Kabupaten Sumbawa. Adanya UMKM dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan PAD di suatu daerah. Hal ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013. Bahwa pajak bagi UMKM dikenakan pajak final 1%. Terdapat peraturan lain yang merevisi PP No 46 tahun 2013 di atas ialah Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 tentang UMKM. Pada PP No 23 tahun 2018 menerangkan bahwa pajak final bagi UMKM diturunkan menjadi 0,5%. Dengan Demikian secara Keseluruhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam menekan Angka Pengangguran dan Kemiskinan. Atas Kontribusi dan Peran UMKM tersebut penting bagi Pemerintah untuk terus mendukung UMKM sehingga melalui perannya dapat menjadi pilar pembangunan ekonomi kabupaten Sumbawa

Kata Kunci : UMKM, Pembangunan Ekonomi, Kabupaten Sumbawa



PENDAHULUAN

Pembangunan sektor ekonomi suatu daerah merupakan suatu hal yang sangat urgen untuk di perjuangkan, mengingat pembangunan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur pembangunan nasional adalah pertumbuhan ekonomi, utamanya dalam meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Sesuai tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah meningkatnya jumlah barang dan jasa serta peluang kerja bagi masyarakat. Salah satu sector yang diharapkan mampu memegang peranan strategis dalam pembangunan ekonomi suatu di ndonesia dan khususnya Kabupaten Sumbawa, adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan data yang ada, jumlah UMKM yang ada di ata UMKM di Indonesia 2022 "Perkembangan terakhir per Juni 2022, sudah 19,5 juta pelaku UMKM atau sebesar 30,4 persen dari total UMKM telah hadir pada "platform e-commerce" kata Teten Masduki dalam B20 Indonesia Digital economy to support SDGs, di Bali, Senin (8/8/2022), sedangkan di Kabupaten Sumbawa sampai dengan tahun 2019 ini seluruhnya mencapai 12.648 unit usaha. Dari Jumlah tersebut, terdapat 1.050 unit usaha yang baru terbentuk pada periode Januari hingga Agustus tahun 2019. Pada tahun ini, pemerintah daerah menargetkan sebanyak 500 UMK akan diterbitkan IUMK-nya, namun yang sudah terealisasi atau sudah diterbitkan iumk-nya sebanyak 310 UMK. Hal itu terungkap pada kegiatan Temu Usaha MICE (*Meeting Incentive Convention Exhibition*) Festival Pesona Moyo 2019 dengan tema "Perluasan Pasar UMKM Melalui Revolusi Industri 4.0" pada Senin (16/9) di Aula H. Madilaoe ADT Lantai 3 Kantor Kantor Bupati Sumbawa. Diantara Potendi Yang Perlu Terus Di Bina Yaitu UMKM di Sumbawa sebenarnya memiliki begitu banyak produk yang potensial. Sebut saja kopi, madu, permen susu, manjareal, masin, kerupuk atom dan lainnya yang harus terus dibina agar semakin

berkembang. Baik dari aspek produksi maupun pemasarannya. Dalam (Suara NTB) 25/6/201

Berdasarkan Hal Tersebut Menurut Sudati Nur Sarfiah bahwa peran masyarakat dalam pembangunan nasional, utamanya dalam pembangunan ekonomi adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Posisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut sangat memungkinkan karena eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia, dengan alasan jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi; potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi UMKM dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) sangat dominan.

Alasan lainnya adalah usaha mikro dan kecil memiliki keunggulan dalam bidang yang memanfaatkan sumber daya alam dan padat karya, utamanya pada sektor pertanian tanaman pangan perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, dan rumah makan/restoran. Usaha menengah memiliki keunggulan dalam penciptaan nilai tambah di sektor hotel, keuangan, persewaan, jasa perusahaan dan kehutanan. Usaha besar memiliki keunggulan dalam industri pengolahan, listrik, gas, komunikasi, dan pertambangan. Maka hal ini membuktikan bahwa UMKM dan usaha besar saling melengkapi dan saling membutuhkan, meskipun pada kenyataannya UMKM lebih dominan dalam penyerapan tenaga kerja hingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional. Sudati Nur Sarfiah, et al (2004:138) berkaitan dengan hal tersebut dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah untuk itu pemerintah melakukan upaya Untuk Memajukan UMKM Indonesia menurut kementerian Investasi/BKPM bahwa upaya yang di lakkan pemerintah dengan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Cipta Kerja

Dari total keseluruhan jumlah UMKM di Indonesia, sebanyak 64,13 juta merupakan



UMK yang masih berada di sektor informal sehingga perlu didorong untuk bertransformasi ke sektor formal. Indonesia masih memiliki kendala dalam perizinan yang rumit serta tumpang tindih antara regulasi di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu Pemerintah berupaya mengakomodir permasalahan tersebut melalui penyusunan UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada tahun 2020. Salah satu substansi yang diatur adalah mengenai kemudahan, perlin dungan dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah berharap melalui UU Cipta Kerja, UMKM dapat terus berkembang dan berdaya saing.

2. Program PEN

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan salah satu program yang dicetuskan pemerintah untuk memulihkan ekonomi Indonesia akibat dampak Covid-19. Program ini juga merupakan respon pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat yang terdampak, khususnya sektor informal atau UMKM. Program ini dibuat berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi PP Nomor 43 tahun 2020. Sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memajukan UMKM, berikut merupakan rincian program PEN untuk UMKM, yaitu :

1. Subsidi bunga/margin
2. Belanja Imbal Jasa Penjaminan (IJP)
3. Penempatan Dana Pemerintah di perbankan
4. Penjaminan loss limit kredit UMKM
5. Pajang penghasilan final UMKM ditanggung pemerintah
6. Pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) koperasi UMKM
7. Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro.

3. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Upaya lain dari pemerintah untuk memajukan UMKM yaitu program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan.

Adapun biaya jasa (suku bunga) atas kredit/pembiayaan modal kerja disubsidi oleh pemerintah. Tujuan KUR adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan dan memperkuat permodalan UMKM.

4. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) merupakan salah satu program pemerintah sebagai upaya pemerintah untuk memajukan UMKM yang diluncurkan pada tahun 2020. Tujuan Gernas BBI yaitu mendorong national branding produk lokal unggulan untuk menciptakan industri baru dan tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui program ini, pemerintah mendorong pelaku UMKM untuk bergabung ke platform digital.

5. Perluasan Ekspor Produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day (AOSD)

(AOSD) atau Hari Belanja Daring ASEAN merupakan acara belanja yang dilakukan secara serentak oleh platform niaga-elektronik di sepuluh negara ASEAN. AOSD diselenggarakan bertepatan pada hari ulang tahun ASEAN yaitu 8 Agustus sejak tahun 2020. Peserta AOSD adalah pelaku usaha di Kawasan ASEAN yang menyediakan barang dan jasa melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). AOSD merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk mempromosikan dan membangun citra produk lokal nusantara ke kancah ASEAN serta mendorong dan meningkatkan kegiatan ekspor produk Indonesia. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memajukan UMKM, meningkatkan jumlah UMKM di Indonesia dan tentunya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, semakin banyak lapangan pekerjaan yang dibuka sehingga angka pengangguran dan kemiskinan di negeri ini dapat menurun. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-mkm->



indonesia).

P-ISSN: 2088-4834 E-ISSN : 2685-5534

<http://stp-mataram.e-journal.id/JHI>

LANDASAN TEORI

Konsep Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut :
 1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UMKM didefinisikan sebagai berikut:
 1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha

Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang UMKM Sebagai Pilar pembangunan ekonomi suatu bangsa .. Sudati Nur Sarfiah, Dkk (2019 :139) .

Berikut Dalam sambutan yang ditayangkan secara virtual, 9 Okt 2022 Dirjen Samuel menyampaikan, berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 64 juta. Jumlah itu mencerminkan sekitar 97 persen tenaga kerja terserap secara nasional. saat ini, jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 59,2 juta pelaku. (CNN Indonesia/Safir Makki).

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) melansir sebanyak 3,79 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sudah memanfaatkan platform online dalam memasarkan produknya. Dan Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Menurut imbu Amalia tahun 2022 ini akan kita dorong terus pemulihan dengan target yaitu kontribusi UMKM ke PDB 63%, rasio kredit UMKM ke total kredit perbankan sebesar 20,9%, dan rasio kewirausahaan nasional 3,75%.28 Feb 2022

Karakteristik UMKM

Karakteristik UMKM di Indonesia dengan posisi strategis UMKM di Indonesia. Pertama,UMKM tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit usaha besar. Kedua, tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal tertentu. Ketiga, sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak



memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar. Keempat, UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi

Pentingnya Peranan UMKM

UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56.534.592 unit. Oleh karena perlu sinergisitas untuk mengembangkan dan mempertahankan UMKM perlu diutamakan melalui penguatan UMKM. UMKM juga telah terbukti mampu bertahan terhadap krisis. Ketika krisis ekonomi terjadi tahun 1997-1998, UMKM mampu membuktikan tetap berdiri kokoh.

Dari data Badan Pusat Statistik menunjukkan pasca krisis ekonomi 1997-1998 itu, jumlah UMKM justru meningkat bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Ditinjau dari pertumbuhannya, tahun 2016 pertumbuhan UMKM meningkat 4,17% dari 34,64% menjadi 38,81% sementara usaha besar justru mengalami penurunan 0,26% dari 9,94% menjadi 9,68%.

Ini menunjukkan bahwa UMKM mampu bertahan pasca krisis 1998. Krisis ekonomi tahun 1997- 1998 yang melanda Indonesia telah membuat perekonomian bangsa seakan terpuruk. UMKM ditengarai sebagai pahlawan ekonomi yang menyelamatkan ekonomi bangsa dari keterpurukan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan jumlah pelaku UMKM pasca krisis ekonomi yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini juga membuktikan bahwa UMKM mampu bertahan di tengah badai krisis ekonomi.

UMKM juga terbukti menyerap tenaga kerja lebih besar dalam kancah perekonomian bangsa, yang meningkat dari 96,99% menjadi 97,22% pada periode sama (tahun 2012 – 2017). Dengan banyaknya tenaga kerja yang terserap, sector UMKM mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian UMKM dianggap memiliki peran strategis dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Atas kontribusi dan peran UMKM tersebut penting bagi pemerintah untuk terus

mendukung UMKM melalui penguatan agar perannya sebagai pilar membangun ekonomi bangsa dapat berjalan secara optimal. Sudati Nur Sarfiah, et al (2019 :145).

Peran klasik UKM yang paling populer dan sangat penting adalah kemampuannya menyediakan kesempatan kerja. UMKM memiliki peran komplementer dengan perusahaan-perusahaan besar dalam penciptaan kesempatan kerja maupun pertumbuhan ekonomi (Giaoutzi et.al, 1988, Alsters dan van Mark 1986, Amstrong et.al, 2000, Nugent, et.al. 2002, Tambunan, 2000, Sudarto, 2001). Di samping perannya yang sangat penting dalam penyerapan tenaga kerja, UKM juga sebagai mediasi proses industrialisasi suatu negara. Anderson (1982) Dyah Ratih Sulistyastuti (2004 :149).

Selanjutnya menurut Effendi UMKM memiliki peran: 1 Sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi; 2 Penyedia lapangan kerja terbesar; 3 Pemeran penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat; 4 Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta 5 Kontribusinya terhadap neraca pembayaran. Efendi Ishak, (2005). Sebagai pilar pembangunan ekonomi bangsa dengan permasalahan sama secara umum yang dihadapi oleh sebagian besar pelaku UMKM adalah kurangnya SDM yang kompeten dibidangnya, Lemahnya kreativitas dan inovasi, lemahnya kemampuan dalam membaca peluang yang ada, permodalan usaha, serta lemahnya strategi pemasaran (marketing).

Sistem jaringan yang masih kurang juga menjadi permasalahan pokok, karena sebaik apapun kualitas produk yang dihasilkan apabila kurang promosi dalam hal pemasaran juga tidak mampu bersaing. Maka dari itu penting bagi pelaku UMKM mempunyai jaringan usaha yang kuat guna memasarkan produk yang dihasilkan. pada praktiknya UMKM ternyata bukan sektor usaha yang bebas masalah.

Dalam perkembangannya, sektor ini justru menghadapi banyak masalah yang perlu perhatian dan penanganan serius. Antara lain masalah permodalan yang disebabkan sulitnya memiliki akses dari lembaga keuangan karena keterbatasan jaminan (*collateral*), kurangnya



akses informasi pasar yang merupakan kendala dalam hal pemasaran. Sehingga berakibat rendahnya orientasi pasar dan lemahnya daya saing di tingkat global. yang makin terbuka dan kompetitif, penguasaan pasar merupakan prasyarat untuk meningkatkan daya saing UMKM.

Maka dari itu, penting bagi UMKM untuk mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat, baik informasi mengenai pasar produksi maupun pasar faktor produksi. Informasi tentang pasar produksi sangat diperlukan untuk memperluas jaringan pemasaran produk yang dihasilkan oleh UMKM. Menurut Effendi Ishak, (2005) informasi pasar produksi atau pasar komoditas yang diperlukan, misalnya (1) jenis barang yang dibutuhkan, (2) daya beli masyarakat, (3) harga pasar yang berlaku, (4) selera konsumen pada pasar lokal, regional maupun internasional. Dengan demikian, UKM dapat mengantisipasi berbagai kondisi pasar sehingga dalam menjalankan usahanya akan lebih inovatif. Sedangkan informasi pasar faktor produksi meliputi: (1) sumber bahan baku yang diperlukan, (2) harga

UMKM Dalam Pembangunan Ekonomi Suatu Daerah

Pengembangan lingkungan *entrepreneurship* sangat diperlukan dalam pembangunan regional. Pengembangan lingkungan *entrepreneurship* mendorong tumbuhnya kemandirian suatu wilayah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Dari berbagai studi empiris, UKM telah terbukti banyak memberikan kontribusi dalam pembangunan regional termasuk mendukung terciptanya lingkungan *entrepreneurship*.

Salah satu kritik utama terhadap kebijakan regional tradisional/klasik pada masa lalu adalah perhatiannya yang terfokus pada masuknya investasi (inward investment) baik dari domestik maupun investasi dari luar negeri. Kebijakan regional tradisional pada awalnya kurang memberikan perhatian yang cukup baik terhadap faktor faktor pembangunan yang asli (indigenous development). Secara khusus,

perhatiannya untuk menstimulasi perusahaan-perusahaan baru, seperti Usaha Kecil Menengah dirasa sangat kurang. Dyah Ratih Sulistyastuti (2004:151).

Kemunculan paradigma baru dalam pembangunan ekonomi regional yang dikenal dengan Modern Regional Policy diyakini memberikan manfaat lebih besar dan berkelanjutan. Argumen utama dalam Modern Regional Policy adalah modal pembangunan yang asli berasal dari dalam wilayah yang bersangkutan. Ada dua kunci yang berperan sebagai modal pembangunan yang asli yaitu Usaha Kecil Menengah (Small Medium Enterprises) dan perkembangan teknologi *technological progress entrepreneurship*. Salah satu kritik utama terhadap kebijakan regional tradisional/klasik pada masa lalu adalah perhatiannya yang terfokus pada masuknya investasi (inward investment) baik dari domestik maupun investasi dari luar negeri.

Kebijakan regional tradisional pada awalnya kurang memberikan perhatian yang cukup baik terhadap faktor faktor pembangunan yang asli (indigenous development). Secara khusus, perhatiannya untuk menstimulasi perusahaan-perusahaan baru, seperti Usaha Kecil Menengah dirasa sangat kurang. Dyah Ratih Sulistyastuti (2004 :152).

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) selalu hadir karena memang diperlukan. UMKM ini selalu pula dapat membuktikan ketahanannya, terutama ketika bangsa kita dilanda badai krisis ekonomi (sejak Juli 1997). UMKM ini tampak merupakan salah satu sektor usaha penyangga utama yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Data BPS dan Kementerian Koperasi dalam Wahyudin (2013:27).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan dalam kajian ini yaitu metode studi literature / dokumen berupa jurnal hasil-hasil penelitian sebelumnya, sesuai dengan topic jurnal yang akan di kaji yaitu UMKM Sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan pada topik ini kemudian di telusuri melalui media



elektronik seperti *Website, Google Browser* dan *Google Cendekia*, maupun Koleksi Jurnal Perpustakaan. Dari masing-masing hasil penelitian yang diperoleh, kemudian di bahas lebih lanjut, sampai memperoleh kesimpulan sebagai kontribusi yang bisa di sumbangkan dari sebagai pendukung hasil penulisan Jurnal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN Potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sumbawa.

Secara umum baik yang berbasis ekonomi kreatif maupun non ekonomi kreatif merupakan pelaku usaha terbesar, Berdasarkan data yang ada, jumlah UMKM yang ada sampai dengan tahun 2019 ini seluruhnya mencapai 12.648 unit usaha. Dari jumlah tersebut, terdapat 1.050 unit usaha yang baru terbentuk pada periode Januari hingga Agustus tahun 2019. Pada tahun ini, pemerintah daerah menargetkan sebanyak 500 UMK akan diterbitkan IUMK-nya, namun yang sudah terealisasi atau sudah diterbitkan iumk-nya sebanyak 310 UMK. Hal itu terungkap pada kegiatan Temu Usaha MICE (Meeting Incentive Convention Exhibition) Festival Pesona Moyo 2019 dengan tema “Perluasan Pasar UMKM

Melalui Revolusi Industry 4.0” pada Senin (16/9) di Aula H. Madilaoe ADT Lantai 3 Kantor Kantor Bupati Sumbawa. Wakil Bupati Sumbawa – H. Mahmud Abdullah memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan temu usaha tersebut. Dirinya berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat dan pengusaha di Kabupaten Sumbaw. Mengingat di era Asean Economic Community (AEC) ini,

UMKM dituntut untuk mampu bersaing. Negara kita merupakan pasar yang besar yang diperebutkan oleh seluruh pelaku usaha di kawasan ASEAN. Karena itu, para pelaku UMKM diarahkan untuk mampu

membangun usahanya menjadi lebih baik sehingga mampu bertahan di tengah era pasar bebas.” tuturnya.

Sebelumnya Kepala Diskoperindag Sumbawa–H.Arif mengatakan, tujuan temu usaha ini adalah meningkatkan dan memperluas pasar UMKM sehingga terjadi peningkatan produksi, mengingat sektor UMKM diakui sebagai sektor usaha yang sangat penting karena berbagai perannya yang sangat nyata dalam perekonomian, mulai dari sumbangannya terhadap PDRB, kemampuannya menyerap tenaga kerja, maupun besarnya jumlah unit usaha yang terlibat. Dikatakan UMKM juga telah terbukti memiliki daya tahan yang cukup kuat menghadapi krisis ekonomi. (PSG) baru bagi PAD di Kabupaten Sumbawa (Sep 16, 2019)

Sumbawa Besar (Suara NTB)– UMKM di Sumbawa sebenarnya memiliki begitu banyak produk yang potensial. Sebut saja kopi, madu, permen susu, manjareal, masin, kerupuk atom dan lainnya yang harus terus dibina agar semakin berkembang. Baik dari aspek produksi maupun pemasarannya. Demikian disampaikan Bupati Sumbawa,

Drs. H. Mahmud Abdullah, ketika membuka kegiatan “Temu Bisnis”, sebagai tindak lanjut rencana kerjasama toko swalayan (Indomaret dan Alfamart), dalam mendukung perkembangan UKM dan IKM di Sumbawa. H. Mo, panggilan akrabnya mendukung kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan daya saing UMKM. Agar dapat bermitra dengan Indomaret maupun Alfamart, yang sudah sangat maju dalam manajemen usahanya. Bupati juga sangat berharap kepada manajemen Indomaret maupun Alfamart, agar gerai-gerainya yang tersebar di hampir seluruh kecamatan di

Kabupaten Sumbawa, dapat menampung produk-produk lokal UMKM. Hingga roda perekonomian masyarakat dapat berputar dengan baik.“Adapun terkait standarisasi produk UMKM, saya minta agar pihak Indomaret maupun Alfamart dapat melakukan pembinaan, begitu juga OPD-OPD terkait lainnya, agar terus mendorong semangat inovasi dan kreativitas UMKM



kita, sehingga memiliki nilai jual dan daya saing yang tinggi,”pinta H. Mo. (arn) Kabupaten Sumbawa melakukan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM yang bertugas dalam pembinaan di Kabupaten Sumbawa. Melalui pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilakukakan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan bahan baku lokal. Berdasarkan hal tersebut maka menurut Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2020 .

Dan Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Pulau Sumbawa terus menggeliat. Ini terlihat pada data penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) per 31 Juli 2022, dimana Kabupaten Sumbawa tertinggi mengakses KUR sebanyak Rp 596,27 miliar dengan jumlah 15.617 debitur. “Peningkatan ini kemungkinan dengan banyaknya event diselenggarakan, investasi mulai masuk dampaknya UMKM bertambah dan akses KUR ikut melonjak,” ucap Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB (Ahmad Masyhuri, Suara NTB Selasa (9/8/2022). Masyhuri menyebut, lonjakan penyaluran KUR juga terjadi di Kabupaten Bima, penyaluran kredit usaha rakyat di kabupaten sumbawa capai setengah triliun. Setiap harinya kurang lebih ada 5 sampai 6 orang mendaftar Perseroan Perorangan. Sampai saat ini sudah ada 32 pendaftar dan kami punya target sebanyak 62 pendaftar lanjutnya (ntb.kemenkumham.go.id).

Menurut Fadli Faturrahman Pertambahan Jumlah UMKM Sebagai Potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa karena PAD dapat bersumber dari pajak dan retribusi. Adanya UMKM dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan PAD di suatu daerah. Hal ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013. Bahwa pajak bagi UMKM dikenakan pajak final 1%. Terdapat peraturan lain yang merevisi PP No 46 tahun 2013 di atas ialah Peraturan Pemerintah No 23 tahun

2018 tentang UMKM. Pada PP No 23 tahun 2018 menerangkan bahwa pajak final bagi UMKM diturunkan menjadi 0,5%. Fadli Faturrahman (2021: 51),.

Masih terkait potensi UMKM, Menurut Junita Wahyulia Azizah, berdasarkan Data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumbawa (2020) UMKM berdasarkan Jenis Usaha Jumlah yaitu : 1. Usaha Mikro 410 ,2. Usaha Kecil 411 , 3 . Usaha Menengah 32 , Junita Wahyulia Azizah, (2022) Pemberdayaan MKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global dan kondisi pasar yang kompetitif.

Dengan berbagai pertimbangan aspek mutu dan kualitas dikarenakan kesadaran konsumen yang semakin selektif pada saat mengambil keputusan pembelian. Pada kenyataannya meskipun jumlah UMKM di Sumbawa cukup tinggi, namun belum mengalami kemajuan karena beberapa faktor diantaranya yaitu, 4 rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya penguasaan teknologi dan informasi (IT), permodalan, pemasaran serta masih kurangnya konsisten dan komitmen dalam pengembangan dan melanjutkan usaha.

Untuk mengatasi permasalahan dalam pengembangan UMKM tersebut, maka di butuhkan peran pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumbawa yang akan berdampak pada perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sumbawa. Dengan demikian, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumbawa dapat membangkitkan citra positif dari masyarakat terhadap UMKM di Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu adanya penelitian tentang “Peran Pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Sumbawa” untuk mengatasi permasalahan yang ada pada UMKM Kabupaten Sumbawa. Adapun permasalahan yang muncul di wilayah Kabupaten Sumbawa, seperti jam kerja melebihi 7-8 jam sehari, bahkan sampai 12

jam disini misalnya UMKM, dimana pegawainya belum melakukan pekerjaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan tetapi terus berlanjut. untuk bekerja di UMKM makanan ini.

Sedangkan mengenai masalah upah karyawan UMKM yang berada di Kabupaten Sumbawa tidak memenuhi kriteria undang-undang ketenagakerjaan Indonesia, dimulai dengan hari kerja yang relatif panjang, bisa mencapai 12 jam, dan gaji pegawai UMKM masih di bawah 2 juta per bulan, dengan uang lembur tidak mencukupi sesuai dengan permintaan dan disini pihak tenaga kerja tidak menyebutkan berapa jumlah upah lembur yang di terima karena tidak menentu begitulah keadaan UMKM dan keluhan tenaga kerja di kabupaten Sumbawa saat ini. Jumlah UMKM dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Sumbawa Terlihat Dalam Tabel Berikut yaitu :

Tabel
Jumlah UMKM Dan Penyerapan
Tenaga Kerja Di Kabupaten Sumbawa
Tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah UMKM	Jumlah Tenaga Kerja
2017	11,727	46,112
2018	11,131	46,521
2019	11,851	47.400
Rata-rata	11.569.	46.677

Sumber: dinas koperasi UMKM kota Sumbawa Provinsi NTB .Dody Hartono (2021: .5).

Dapat disimpulkan bahwa , seperti yang terlihat pada tabel di atas. Jumlah UMKM meningkat dari tahun ke tahun, karena minat masyarakat yang kuat terhadap UMKM yang saat ini banyak jumlahnya. Dan saat ini pemerintah Kabupaten Sumbawa sedang mengeluarkan kebijakan, sebagai salah satu upaya yang mendukung pengembangan umkm untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kabupaten Sumbawa

agar Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Pulau Sumbawa terus menggeliat. yaitu penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana Kabupaten Sumbawa tertinggi mengakses KUR sebanyak Rp 596,27 miliar dengan jumlah 15.617 debitur.

Peningkatan ini kemungkinan dengan banyaknya event diselenggarakan, investasi mulai masuk dampaknya UMKM bertambah dan akses KUR ikut melonjak ucap Kepala Dinas Koperasi dan UMKM (Ahmad Masyhuri, Suara NTB Selasa (9/8/2022). Masyhuri menyebut, lonjakan penyaluran KUR juga terjadi di Kabupaten Bima sebesar Rp 500,4 miliar dengan debitur 12.521 orang.

Kemudian, Kabupaten Dompu mencapai nilai Rp Rp 255,5 miliar dengan 6.258 debitur. Selanjutnya, KSB dan Kota Bima masing-masing penyaluran KUR mencapai Rp 106,52 miliar dan Rp 61,82 miliar. Dengan jumlah debitur masing-masing sebanyak 2.603 dan 951 orang. Sementara di Pulau Lombok, penyaluran KUR tertinggi ada di Kabupaten Lotim yang mencapai Rp 699,5 miliar dengan 18.444 debitur. Menyusul Kabupaten Loteng sebesar Rp 633,4 miliar dengan 16.273 debitur. Kemudian, Kabupaten Lobar sebesar Rp 337,5 miliar dengan 8.718 debitur. Sedangkan Kota Mataram dan KLU mencapai Rp 307,6 miliar dan Rp 105,8 miliar.

Dengan jumlah debitur 5.866 dan 2.660 debitur.Guna menggenjot sektor UMKM, sambungnya, dengan akses KUR yang semakin bertambah maka sudah seharusnya produk-produk UMKM di NTB tak lagi menjual dalam barang mentah. Barang mentah harus berproses industrialisasi agar dapat memberikan nilai tambah.Sebagai contoh, hasil produksi bawang merah dan jagung yang ada di Sumbawa, KSB, Dompu, Bima dan Kota Bima harus disentuh dengan industrialisasi dimana ada produk turunannya.

Kalau kemarin hanya jual jagung saja, besok itu bisa jual pakan ternak, peternakan berkembang, berdampak pada pengolahan ternak sehingga kita tidak kesulitan lagi mau



dibawa kemana hasil panen jagung ini, teranginya. Sementara itu, Plt Kepala Bidang Fasilitas Pembiayaan Simpan Pinjam Dinas Koperasi dan UMKM NTB, H Muhammad Adhar menambahkan, penyaluran KUR di NTB per Juli 2022 telah mencapai 60-70 persen dari realisasi penyaluran KUR tahun 2019-2021 dengan total Rp 5,09 triliun dan jumlah debitur mencapai 151.776 orang. Ini belum satu tahun saja, enam bulan penyaluran KUR mencapai Rp 3,6 triliun dengan jumlah 89.475 debitur.

Tahun ini ditargetkan melampaui tahun sebelumnya dengan kenaikan 10 persen,” Ia menekankan, untuk mengakses KUR adalah pelaku UMKM yang berbeda atau baru. Jika ingin mengakses KUR lagi maka angsuran KUR sebelumnya harus lunas terlebih dahulu. Menurutnya, pada penyaluran KUR tahun ini didominasi pada sektor perdagangan besar dan eceran yang mencapai Rp 1,7 triliun dengan jumlah 39.073 debitur. Sedangkan sektor pertanian, perburuan dan kehutanan mencapai Rp 1,3 triliun dengan jumlah 40.302 debitur. “Untuk Pulau Sumbawa lebih banyak diakses sebagai modal perdagangan dan pertanian. Kebanyakan untuk hasil jagung, kalau di Bima untuk akses permodalan seperti bibit jagung, bawang dan lainnya,” tutupnya. (Ahmad Masyhuri, Suara NTB Selasa (9/8/2022)).

PENUTUP

Kesimpulan

Pembangunan sektor ekonomi suatu daerah merupakan suatu hal yang sangat urgen untuk di perjuangkan, mengingat pembangunan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur dari pembangunan nasional adalah pertumbuhan ekonomi, Salah satu sector yang diharapkan mampu memegang peranan strategis dalam pembangunan ekonomi suatu daerah dan khususnya Kabupaten Sumbawa, adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), berdasarkan hasil kajian dalam jurnal dengan judul Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Pilar

Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sumbawa, ditunjukkan sebagai berikut :

1. Potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sumbawa. Cukup banyak. Secara umum saat ini Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) baik yang berbasis ekonomi kreatif maupun non ekonomi kreatif merupakan pelaku usaha terbesar dengan produk yang potensial. sebut saja kopi, madu, permen susu, manjareal, masin, kerupuk atom dan lainnya terus dibina agar semakin berkembang. baik dari aspek produksi maupun pemasarannya.
2. Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Cukup Besar
Berdasarkan data yang ada, jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Sumbawa sampai dengan tahun 2019 ini seluruhnya mencapai 12.648 unit usaha. dari jumlah tersebut, terdapat 1.050 unit usaha yang baru terbentuk pada periode januari hingga agustus tahun 2019. pada tahun ini, pemerintah daerah menargetkan sebanyak 500 umk akan diterbitkan iumk-nya, namun yang sudah terealisasi atau sudah diterbitkan iumk-nya sebanyak 310.
3. Penyerapan Tenaga Kerja Melalui UMKM meningkat setiap Tahun.
4. Berdasarkan data 3 Tahun terakhir bahwa Tahun 2017 Jumlah UMKM. Sebanyak 11,727 dengan Jumlah penyerapan tenaga kerja sebanyak 46,112, Tahun 2018 Jumlah UMKM. Sebanyak 11,131 dengan Jumlah penyerapan tenaga kerja sebanyak 46,521, Tahun 2019 Jumlah UMKM. Sebanyak 11,851 dengan Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja sebanyak 47.400 dan rata dari 3 Tahun jumlah UMKM =11.569. Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja 46.677. Jumlah UMKM dan penyerapan tenaga kerja semakin meningkat dari tahun ke tahun, karena minat masyarakat yang kuat terhadap UMKM.
5. Pemerintah dan Perbankan Sangat Mendukung Pengembangan (UMKM)



6. Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Pulau Sumbawa terus menggeliat. Dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) per 31 Juli 2022, dimana Kabupaten Sumbawa tertinggi mengakses KUR sebanyak Rp 596,27 miliar dengan jumlah 15.617 debitur. "Peningkatan ini kemungkinan dengan banyaknya event diselenggarakan, investasi mulai masuk dampaknya UMKM bertambah dan akses KUR ikut melonjak,"
7. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Memegang Peran Strategis. Hal ini atas menggambarkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan hal yang sangat urgen untuk membangun ekonomi suatu daerah dengan perannya yang sangat nyata dalam perekonomian, mulai dari sumbangannya terhadap pdrb, kemampuannya menyerap tenaga kerja, maupun besarnya jumlah unit usaha yang terlibat. Dikatakan UMKM juga telah terbukti memiliki daya tahan yang cukup kuat menghadapi krisis ekonomi. Adanya UMKM dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan pada di suatu daerah. hal ini diatur di dalam peraturan pemerintah no 46 tahun 2013. bahwa pajak bagi umkm dikenakan pajak final 1%. terdapat peraturan lain yang merevisi pp no 46 tahun 2013 di atas ialah peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 tentang umkm. pada pp no 23 tahun 2018 menerangkan bahwa pajak final bagi umkm diturunkan menjadi 0,5%. Dengan demikian secara keseluruhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Atas kontribusi dan peran UMKM tersebut penting bagi pemerintah untuk terus mendukung UMKM sehingga melalui perannya dapat menjadi pilar pembangunan ekonomi Kabupaten Sumbawa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad Masyhuri , Penyaluran KUR di Kabupaten Sumbawa Capai Setengah Triliun, From <https://lombokpost.jawapos.com/ekonomi-bisnis/12/08/2022/penyaluran-kur-di-kabupaten-sumbawa-capai-setengah-triliun/>.
- [2] Data UMKM di Indonesia 2022 from <https://www.google.com/search?rlz=1C1VDKBenID1023ID1023&q=Data+UMKM+2022&sa=X&ved=2ahUKEwjFiPac1tf7AhV3T2wGHUMKMdiIndonesia%20saat%20ini%20ada%20berapa?>
- [3] Dyah Ratih Sulistyastuti , Dinamika Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Analisis Konsentrasi Regional Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 9 No. 2, Desember 2004 Hal: 143 – 164
- [4] Dody Hartono, 2021 , Dampak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sumbawa, 2021, Hal 5, From https://repository.ummat.ac.id/2920/1/Cover-Bab%20iii_Dody%20hartono_%20217120184_Administrasi%20bisnis.Pdf
- [5] Effendi Ishak. 2005. Artikel : Peranan Informasi Bagi Kemajuan UKM. Kedaulatan Rakyat. Yogyakarta
- [6] Fadli Faturrahman, Pertambahan Jumlah Umkm Sebagai Potensi PAD Kabupaten ,(Journal Of Accounting, Finance And Auditing Vol. 3 No.2 (2021), Pp 48-56).
- [7] Junita Wahyulia Azizah, 2022, Skripsi Peran Pembinaan Dinas Koperasi Dan Umkm Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Sumbawa, ,Hal 3 .from <https://repository.ummat.ac.id/4640/1/COVER%20-%20BAB%20III.pdf>
- [8] Kadiv Yankumham Kanwil Kemenkumham NTB Koordinasikan PP dan KI dengan Disperindag Sumbawa Bes from <https://ntb.kemenkumham.go.id/berita->



- kanwil/berita-utama/4643-kadiv-yankumham-kanwil-kemenkumham-ntb-koordinasikan-pp-dan-ki-dengan-disperindag-sumbawa-besar
- [9] Sumbawa, PSnews , Sejak Awal 2019, 1.050 UMKM Baru Terbentuk di Sumbawa
from,<https://pulausumbawanews.net/2019/09/16/sejak-awal-2019-1-050-umkm-baru-terbentuk-di-sumbawa/> .
- [10] Sudati Nur Sarfiah, Hanung Eka Atmaja. Dian Marlina Verawati, UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa Msmes The Pillar For Economy .Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) Volume 4 Nomor 2 2019
- [11] Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia, from <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia>
- [12] Potensi Besar UMKM Di Sumbawa Harus Terus Di Bina From, <https://www.suarantb.com/2021/06/25/potensi-besar-umkm-di-sumbawa-harus-terus-dibina/>
- [13] Wahyudin, Dian. 2013. Peluang atau Tantangan Indonesia Menuju ASEAN Economic Community 2015. Lembaga Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang